

## MODEL IMPLEMENTASI PENINGKATAN MUTU PAUD DI KOTA PEKANBARU

Reni Bafita, Seno Andri, Febri Yuliani, Ria Novianti

Universitas Riau, Indonesia

\*Corresponding Author:

[reni.bafita@gmail.com](mailto:reni.bafita@gmail.com)

---

### ***Abstract.***

*This study aims to formulate an implementation model for improving the quality of Early Childhood Education (PAUD) in Pekanbaru City as an effort to strengthen the foundation of basic education services. The background of this research stems from various challenges faced by PAUD institutions, including limited teacher competencies, inadequate learning facilities, low parental involvement, and inconsistent support from local government policies in meeting national standards for early childhood education. A qualitative research approach was employed, utilizing in-depth interviews, observations, and document studies with PAUD managers, teachers, parents, and policymakers at the Pekanbaru City Education Office. The findings reveal that improving the quality of PAUD requires an integrated strategy involving continuous professional development for teachers, provision of appropriate learning facilities tailored to children's developmental stages, and strengthened collaboration between educational institutions, families, and local government. The proposed implementation model emphasizes three main dimensions: (1) enhancing teacher competencies, (2) optimizing policy and funding support from local government, and (3) fostering participatory collaboration between schools and communities. This study concludes that an integrated and sustainable quality improvement model is an effective strategy to ensure high-quality early childhood education services in Pekanbaru City.*

*Keywords: implementation model, quality improvement, early childhood education, Pekanbaru*

---

## PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) telah mengalami transformasi paradigma yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dari yang semula dipandang sebagai program pendamping menjadi fondasi strategis pembangunan sumber daya manusia. Pergeseran perspektif ini didukung oleh akumulasi bukti empiris dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari neurosains, psikologi perkembangan, hingga ekonomi, yang secara konsisten menunjukkan bahwa investasi pada periode

awal kehidupan anak memberikan dampak paling optimal terhadap perkembangan kognitif, sosial-emosional, dan kesuksesan ekonomi jangka panjang. Temuan revolusioner dalam bidang neurosains mengungkapkan bahwa perkembangan otak manusia mengikuti pola yang sangat dinamis, dimana pengalaman dalam tahun-tahun awal masa kanak-kanak mempengaruhi perkembangan arsitektur otak dengan cara yang tidak dapat direplikasi oleh pengalaman di periode kehidupan selanjutnya (Nelson, 2013). Lebih dari 1 juta koneksi saraf baru terbentuk setiap detik dalam beberapa tahun pertama kehidupan, suatu kecepatan pembentukan jaringan neural yang tidak pernah terulang sepanjang hidup manusia (First Focus Campaign for Children, 2023). Signifikansi periode ini semakin diperkuat oleh temuan bahwa pada usia 5 tahun, otak anak sudah berkembang 90%, dan koneksi otak kritis untuk kemampuan tingkat tinggi seperti pemecahan masalah, empati, dan kontrol diri terbentuk atau tidak terbentuk di tahun-tahun awal (First Things First, 2024).

Konsep "window of opportunity" dalam perkembangan anak mendapat validasi ilmiah melalui penelitian yang menunjukkan bahwa periode kritis pertama perkembangan otak dimulai sekitar usia 2 tahun dan berakhir sekitar usia 7 tahun, dimana beberapa keterampilan tidak dapat dipelajari dengan baik setelah periode kritis pertama ini (Education, 2022). Fenomena ini paling jelas terlihat dalam penguasaan bahasa, dimana anak-anak dalam rentang usia tersebut dapat menguasai bahasa kedua pada tingkat yang setara dengan penutur asli, kemampuan yang mengalami penurunan signifikan setelah usia 8 tahun. Dampak jangka panjang PAUD telah divalidasi melalui studi longitudinal yang mengikuti perkembangan anak selama beberapa dekade. Penelitian menunjukkan bahwa manfaat jangka panjang dari program prasekolah berkualitas meliputi aspek akademik, sosial, dan sikap, dimana sikap terhadap sekolah menjadi variabel penting dalam mengatasi perbedaan antar kelompok (Schweinhart et al., 2016). Temuan terbaru dalam jurnal *Child Development* memperkuat argumentasi ini dengan menunjukkan bahwa siswa yang berpartisipasi dalam program prasekolah yang didanai negara lebih mungkin menghadiri sekolah secara teratur dan mengambil kursus yang lebih menantang dibandingkan mereka yang tidak mengikuti program PAUD (Education Week, 2022). Lebih lanjut, kesiapan sekolah yang dibangun melalui PAUD berkualitas terbukti memiliki efek prediktif yang kuat, dimana anak yang memasuki taman kanak-kanak dengan siap bersekolah memiliki kemungkinan 82% untuk menguasai keterampilan dasar pada usia 11 tahun, dibandingkan dengan kemungkinan 45% untuk anak-anak yang tidak siap bersekolah (First Focus Campaign for Children, 2023).

Perspektif global mengenai urgensi PAUD diperkuat oleh UNICEF yang menekankan bahwa pengalaman awal membuat perbedaan kritis saat otak berkembang, memberikan fondasi yang kuat atau lemah untuk pembelajaran,

kesehatan, dan perilaku sepanjang hidup, dimana dalam beberapa tahun pertama kehidupan, lebih dari satu juta koneksi saraf terbentuk setiap detik—kecepatan yang tidak pernah terulang lagi sepanjang hidup (UNICEF, 2023). Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa jutaan anak di seluruh dunia tidak menerima nutrisi atau perawatan kesehatan yang mereka butuhkan, tumbuh terpapar kekerasan, lingkungan tercemar, dan stres ekstrem, yang mengakibatkan hilangnya kesempatan emas untuk optimalisasi perkembangan.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan fondasi strategis yang menentukan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Pada masa usia dini, 90% dari total perkembangan otak terjadi sebelum anak berusia 5 tahun, membuat periode ini menjadi *golden age* yang sangat krusial (MTs Negeri 8 Sleman, 2024). UNESCO (2021) menegaskan bahwa investasi pada pendidikan anak usia dini memberikan *multiplier effect* hingga 7-10% per tahun dalam jangka panjang, sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs) 4.2 tentang akses universal pendidikan anak usia dini berkualitas. Di Indonesia, komitmen pemerintah terhadap pengembangan PAUD diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) yang mengintegrasikan aspek pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, dan kesejahteraan anak secara simultan dan sistematis (Bappenas, 2024). Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang menggariskan pentingnya layanan pendidikan yang bermutu sejak dini. Secara nasional, landasan hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa PAUD merupakan upaya pembinaan anak sejak lahir hingga usia enam tahun, dilakukan melalui jalur formal, nonformal, dan informal. Penguatan peran pendidik diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang mewajibkan guru PAUD memiliki kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV serta sertifikasi profesi. Selanjutnya, standar nasional pendidikan, termasuk untuk PAUD, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menekankan delapan standar pendidikan, seperti standar isi, proses, sarana prasarana, dan kompetensi pendidik.

Secara teknis, Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 menetapkan Standar Nasional PAUD, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan PAUD bermutu. Regulasi ini mensyaratkan satuan PAUD memiliki kurikulum berbasis perkembangan anak, tenaga pendidik yang terdidik dan kompeten, serta sarana prasarana yang sesuai. Di samping itu, Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 mengatur syarat pendirian lembaga PAUD, sedangkan Permendikbudristek Nomor 17 Tahun 2021 mengatur implementasi kurikulum PAUD yang berorientasi pada

pendekatan holistik integratif. Di tingkat daerah, Kota Pekanbaru juga telah mengembangkan regulasi dan kebijakan lokal untuk mendukung PAUD. Salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang menegaskan bahwa pendidikan anak usia dini merupakan bagian integral dari sistem pendidikan kota yang wajib didukung. Sebagai bentuk implementasi lebih lanjut, dikeluarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PAUD Holistik Integratif, yang mendorong keterlibatan lintas sektor seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Bappeda dalam mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh melalui pendekatan pendidikan, gizi, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan. Selain itu, Pemerintah Kota Pekanbaru juga mengembangkan program Satuan PAUD Ramah Anak yang terintegrasi dengan kebijakan sekolah ramah anak berbasis SK Wali Kota, serta menetapkan target-target peningkatan mutu PAUD dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru 2021–2026.

Namun demikian, implementasi kebijakan PAUD di Indonesia dan kota pekanbaru khususnya menghadapi tantangan serius yang tercermin dari kondisi empiris di lapangan. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 yang dilakukan BPS dengan melibatkan 345.000 rumah tangga sampel di 34 provinsi menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Indonesia baru mencapai 36,36 persen (BPS, 2024). Data Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikdasmen (2024) menunjukkan paradoks yang mengkhawatirkan dimana peningkatan jumlah sekolah PAUD justru tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah peserta didik PAUD yang turun signifikan sebanyak 203.936 siswa pada tahun 2024, disertai pengurangan guru PAUD sebanyak 5.805 guru pada periode yang sama. Kondisi ini mengindikasikan adanya permasalahan sistemik dalam implementasi kebijakan PAUD yang memerlukan kajian mendalam.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Pekanbaru menghadapi berbagai tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2024/2025, terdapat 534 lembaga PAUD yang melayani 17.835 siswa dengan 1.713 tenaga pendidik. Meskipun jumlah ini menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini, namun kualitas layanan masih menghadapi berbagai permasalahan mendasar yang perlu segera diatasi. Fenomena pertama yang menjadi permasalahan krusial adalah rendahnya tingkat pendidikan guru PAUD yang masih menjadi tantangan struktural dalam sistem pendidikan anak usia dini di Indonesia. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru PAUD diwajibkan memiliki kualifikasi akademik minimal Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D-IV) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi dari program

studi terakreditasi (Direktorat PPG Kemendikdasmen, 2024). Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 16 Tahun 2007 juga menegaskan bahwa setiap guru di jenjang PAUD/TK/RA diwajibkan memiliki pendidikan minimal D-IV atau S1 dalam bidang PAUD atau psikologi dengan program studi terakreditasi (Dinas Pendidikan Kota Denpasar, 2024).

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam merealisasikan tujuan-tujuan publik yang telah ditetapkan (Thabrani et al., 2022). Implementasi yang efektif memastikan bahwa kebijakan tidak hanya menjadi dokumen statis, tetapi juga menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat (Utari et al., 2024). Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, mulai dari isi kebijakan itu sendiri hingga lingkungan di mana kebijakan tersebut diterapkan (Afriзал & Rodiyah, 2023). Manfaat yang dihasilkan oleh suatu kebijakan menjadi salah satu penentu keberhasilannya, seperti peningkatan kinerja, disiplin, dan semangat kerja pegawai melalui kebijakan tambahan penghasilan (Suryani et al., 2021).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Analisis Bibliometrik Menggunakan *Vos Viewer***

Bibliometrik, menawarkan wawasan tentang pola publikasi, tren penelitian, dan dampak karya, penulis, atau institusi tertentu. Pendekatan ini memberikan perspektif tingkat makro tentang evolusi pengetahuan dalam suatu disiplin ilmu, memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi bidang-bidang utama pertumbuhan, jaringan kolaborasi, dan topik yang muncul (Ghert, escu et al., 2024). VOSviewer, alat perangkat lunak yang dikembangkan oleh Van Eck dan Waltman, mengkhususkan diri dalam representasi grafis peta bibliometrik, memfasilitasi visualisasi dan interpretasi hubungan kompleks dalam kumpulan data besar (Díaz-García et al., 2022).

Ini memungkinkan peneliti untuk membangun jaringan berdasarkan kepenulisan bersama, kemunculan kata kunci bersama, analisis kutipan, dan metrik relevan lainnya, menawarkan sarana visual untuk mengeksplorasi struktur dan dinamika bidang ilmiah (Márquez et al., 2023). Analisis data bibliometrik melalui alat pemetaan visual seperti VOSviewer telah menjadi semakin penting dalam lanskap teknologi kita yang berkembang pesat, karena menawarkan sarana untuk menggambarkan dan memahami kemajuan dan kinerja penelitian di berbagai domain ilmiah (Husaeni & Nandiyanto, 2021). Penerapan analisis bibliometrik sangat berguna di bidang interdisipliner, di mana konvergensi disiplin ilmu yang berbeda dapat sulit dilacak melalui metode tinjauan literatur tradisional (Xue et al., 2021).

Kekuatan VOSviewer terletak pada kemampuannya untuk membuat visualisasi jaringan dari data bibliografi, menjadikannya alat yang tak ternilai untuk mengeksplorasi struktur intelektual domain penelitian (Qin et al., 2023). Dengan memetakan hubungan antara publikasi, penulis, atau kata kunci, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang evolusi bidang dan mengidentifikasi karya yang berpengaruh, kluster penelitian, dan tren yang muncul (Ghert, escu et al., 2024).

### **Kebijakan Publik**

Seringkali terjadi berbagai masalah dalam kehidupan masyarakat di wilayah hukum suatu negara. Negara yang bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan warganya harus memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah-permasalahan tersebut. Kebijakan negara diharapkan dapat menyelesaikan masalah. Untuk memahami lebih lanjut bagaimana kebijakan publik dapat menyelesaikan masalah masyarakat, kita harus memahami dulu apa itu kebijakan publik. Menurut para ahli kebijakan publik, ini adalah definisi kebijakan publik.

Harold Laswell dan Abraham Kaplan mendefinisikan kebijakan publik sebagai “suatu program yang diproyeksikan dengan berbagai tujuan, nilai, dan praktik tertentu (a projected program of goals, values, and practices)” dalam Nugroho (2014:3). Karl I Fredrick dalam Nugroho (2014:4) mengatakan itu adalah kumpulan tindakan yang disarankan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, meskipun ada ancaman dan peluang. Tujuan kebijakan tersebut adalah untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi hambatan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu.

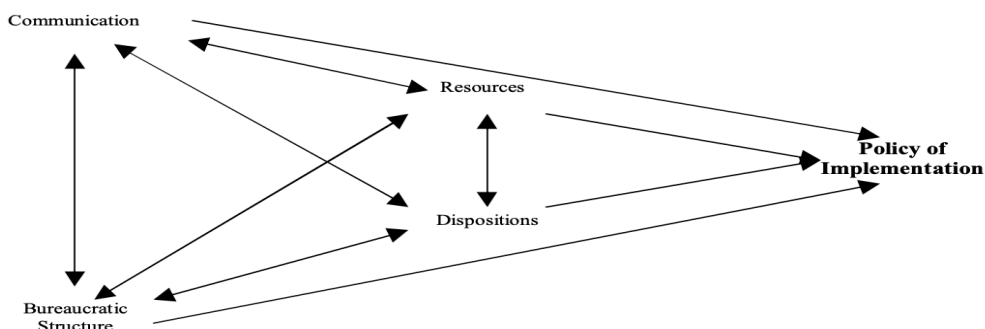
Menurut Thomas R., Kebijakan publik, menurut Dye dalam Subiyanto (2020:3) adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (apapun yang dipilih pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan). Ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah, baik secara eksplisit maupun implisit, merupakan kebijakan. Interpretasi ini menunjukkan bahwa kebijakan dilaksanakan oleh lembaga atau lembaga pemerintah, dan ada opsi untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. George C “Kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan lakukan, atau tidak dilakukan,” kata Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Kadji (2015: 9). Kebijakan sebenarnya adalah kumpulan tujuan dan tujuan program pemerintah, baik yang dilaksanakan maupun yang tidak.

### **Implementasi Kebijakan**

Selama ini, negara menjalankan kebijakan publik melalui badan-badan pemerintahannya. Karena implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan upaya pemerintah untuk melaksanakan tugas utamanya, yaitu memberikan pelayanan publik. Namun, faktanya adalah bahwa berbagai kebijakan publik diterapkan dalam berbagai bidang, sasaran, bahkan kepentingan, memaksa

pemerintah untuk menggunakan kebijaksanaan mereka sendiri untuk menentukan apa yang harus mereka lakukan dan apa yang tidak. Tidak selalu ada jaminan bahwa kebijakan akan berhasil diterapkan karena tahap rekomendasi implementasi kebijakan sangat kompleks. Beberapa faktor memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Ini termasuk pertimbangan para pembuat kebijakan, komitmen dan konsistensi para pelaksana kebijakan, dan perilaku sasaran.

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96), ada empat komponen yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, antara lain:



**Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Menurut Edwards III**

Sumber Edwards III dalam Kadji (2015: 63)

Komunikasi adalah "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan", menurut Edward III dalam Widodo (2010:97). Semua korespondensi harus disampaikan kepada personel yang tepat dan harus jelas, akurat, dan konsisten. Dalam kasus ini, Edwards III dalam Kadji (2015:64) mengatakan bahwa implementasi kebijakan dapat berhasil hanya jika orang yang bertanggung jawab atas proses tersebut tahu apa yang harus dilakukan. Perintah untuk menerapkan kebijakan harus jelas diberikan, akurat, dan konsisten dengan mereka yang mampu melakukannya. Kesalahpahaman akan terjadi di tingkat implementor kebijakan jika pesan dan perintah pembuat kebijakan tidak jelas dan tidak terdefinisi. Kebingungan pasti akan muncul di tingkat implementor, terutama dalam hal pemahaman mereka tentang fungsi dekripsi yang harus dilakukannya. Kondisi ini akan memungkinkan mereka untuk menolak untuk menerapkan kebijakan tersebut sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan atau pemberi mandat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang berfokus pada implementasi peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Pekanbaru. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi kebijakan

dalam konteks yang alamiah, khususnya berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam peningkatan mutu PAUD (Afrizal & Rodiyah, 2023). Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif tepat digunakan ketika peneliti berupaya memahami makna dari suatu fenomena dari perspektif partisipan. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek implementasi kebijakan yang tidak dapat dikuantifikasi, seperti persepsi stakeholder terhadap kebijakan, dinamika hubungan antar aktor dalam implementasi, serta konteks sosial-politik yang mempengaruhi proses implementasi (Thabrani et al., 2022).

Metode studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, yaitu implementasi kebijakan peningkatan mutu PAUD di Kota Pekanbaru. Yin (2014) menegaskan bahwa studi kasus sangat sesuai untuk menjawab pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa," khususnya ketika peneliti memiliki sedikit kontrol atas peristiwa yang diteliti. Dalam hal ini, penelitian berupaya memahami bagaimana implementasi kebijakan berlangsung dan mengapa terdapat gap antara kondisi ideal dengan realitas di lapangan. Penelitian ini bersifat eksploratif dan deskriptif karena berupaya menggali pemahaman mendalam tentang kondisi eksisting implementasi peningkatan mutu PAUD, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, dan mengembangkan model implementasi yang lebih efektif (Utari et al., 2024). Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Metode ini dipilih karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Data dalam penelitian ini akan dikumpulkan secara bertahap melalui berbagai sumber, termasuk wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, studi dokumentasi, dan observasi lapangan. Analisis data dilakukan secara induktif untuk membangun pemahaman komprehensif tentang bagaimana implementasi kebijakan peningkatan mutu PAUD dapat dioptimalkan di Kota Pekanbaru (Suryani et al., 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam sistem PAUD Kota Pekanbaru adalah rendahnya tingkat pendidikan formal guru. Data menunjukkan bahwa masih banyak guru yang hanya memiliki latar belakang pendidikan setingkat SMA, terutama di lembaga Tempat Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat anak usia dini memerlukan pendekatan pedagogis yang tepat dan berbasis ilmu perkembangan anak.

**Tabel 1. Distribusi Tingkat Pendidikan Guru PAUD**

| Jenis Lembaga | Total Guru | SMA | D1/D2/D3 | S1    | S2 | % Guru SMA |
|---------------|------------|-----|----------|-------|----|------------|
| TK            | 1.243      | 187 | 92       | 941   | 23 | 15,0%      |
| KB            | 364        | 116 | 36       | 205   | 7  | 31,9%      |
| TPA           | 73         | 47  | 3        | 21    | 2  | 64,4%      |
| SPS           | 33         | 16  | 1        | 16    | 0  | 48,5%      |
| Total         | 1.713      | 366 | 132      | 1.183 | 32 | 21,4%      |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2025*

Fenomena yang paling mengkhawatirkan terlihat pada TPA dimana 64,4% guru hanya berpendidikan SMA. Padahal, TPA menangani anak-anak usia 0-4 tahun yang merupakan masa golden age dengan kebutuhan stimulasi dan pengasuhan yang sangat spesifik. Demikian pula dengan SPS yang memiliki 48,5% guru berpendidikan SMA, menunjukkan bahwa program-program PAUD non-formal masih kekurangan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi akademis memadai. Masalah lain yang tidak kalah serius adalah ketimpangan status kepegawaian guru PAUD. Mayoritas guru PAUD berstatus Guru Tidak Tetap Yayasan (GTY) yang tidak memiliki jaminan keamanan kerja jangka panjang. Status kepegawaian yang tidak stabil ini berdampak pada kualitas pengajaran dan komitmen guru dalam mengembangkan kariernya di bidang pendidikan anak usia dini.

**Tabel 2. Status Kepegawaian Guru PAUD**

| Jenis Lembaga | Total Guru | PNS | GTY   | GTT & Lainnya | % PNS |
|---------------|------------|-----|-------|---------------|-------|
| TK            | 1.243      | 49  | 1.054 | 140           | 3,9%  |
| KB            | 364        | 0   | 341   | 23            | 0,0%  |
| TPA           | 73         | 0   | 73    | 0             | 0,0%  |
| SPS           | 33         | 0   | 33    | 0             | 0,0%  |
| Total         | 1.713      | 49  | 1.501 | 163           | 2,9%  |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2025*

Data ini menunjukkan bahwa hanya 2,9% guru PAUD yang berstatus PNS, sementara 87,6% lainnya berstatus GTY dan 9,5% berstatus GTT atau lainnya. Kondisi ini menciptakan ketidakstabilan dalam sistem pendidikan karena guru-guru tersebut tidak memiliki jaminan karier yang jelas dan kesejahteraan yang memadai.

Permasalahan kualitas PAUD di Kota Pekanbaru juga tercermin dari rendahnya pencapaian akreditasi A. Akreditasi merupakan indikator penting yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, termasuk aspek kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, dan manajemen lembaga. Data menunjukkan

bahwa mayoritas lembaga PAUD masih berada pada level akreditasi B dan C.

**Tabel 3. Distribusi Akreditasi Lembaga PAUD**

| <b>Jenis Lembaga</b> | <b>Total Lembaga</b> | <b>Akreditasi A</b> | <b>Akreditasi B</b> | <b>Akreditasi C</b> | <b>% Akreditasi A</b> |
|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TK</b>            | 334                  | 68                  | 195                 | 50                  | 20,4%                 |
| <b>KB</b>            | 150                  | 11                  | 69                  | 54                  | 7,3%                  |
| <b>TPA</b>           | 35                   | 1                   | 16                  | 12                  | 2,9%                  |
| <b>SPS</b>           | 15                   | 0                   | 3                   | 12                  | 0,0%                  |
| <b>Total</b>         | <b>534</b>           | <b>80</b>           | <b>283</b>          | <b>128</b>          | <b>15,0%</b>          |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2025*

Hanya 15% dari total lembaga PAUD yang mencapai akreditasi A, sementara 53% berada di level B dan 24% di level C. Yang paling mengkhawatirkan adalah TPA dan SPS yang hampir tidak ada yang mencapai akreditasi A. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga PAUD masih memiliki kekurangan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan. Analisis distribusi siswa PAUD per kecamatan menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup signifikan. Beberapa kecamatan memiliki konsentrasi siswa yang sangat tinggi sementara kecamatan lain masih minim. Ketimpangan ini tidak hanya terkait dengan jumlah siswa tetapi juga kualitas layanan yang diberikan.

**Tabel 4. Distribusi Siswa PAUD Per Kecamatan (5 Tertinggi dan 5 Terendah)**

| <b>Ranking</b> | <b>Kecamatan</b> | <b>TK</b>  | <b>KB</b>  | <b>TPA</b> | <b>SPS</b> | <b>Total Siswa</b> |
|----------------|------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------|
| <b>1</b>       | Tuah Madani      | 1.846      | 743        | 0          | 0          | 2.589              |
| <b>2</b>       | Marpoyan Damai   | 1.992      | 160        | 80         | 38         | 2.270              |
| <b>3</b>       | Payung Sekaki    | 1.833      | 456        | 48         | 0          | 2.337              |
| <b>4</b>       | Bukit Raya       | 1.637      | 197        | 48         | 26         | 1.908              |
| <b>5</b>       | Bina Widya       | 1.104      | 476        | 217        | 0          | 1.797              |
| <b>...</b>     | <b>...</b>       | <b>...</b> | <b>...</b> | <b>...</b> | <b>...</b> | <b>...</b>         |
| <b>11</b>      | Kulim            | 523        | 83         | 0          | 0          | 606                |
| <b>12</b>      | Sukajadi         | 498        | 61         | 0          | 15         | 574                |
| <b>13</b>      | Senapelan        | 311        | 87         | 21         | 0          | 419                |
| <b>14</b>      | Rumbai Timur     | 246        | 10         | 1          | 5          | 262                |
| <b>15</b>      | Rumbai Barat     | 89         | 59         | 0          | 51         | 199                |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2025*

Disparitas ini menunjukkan bahwa kecamatan Tuah Madani melayani 13 kali lebih banyak siswa dibandingkan Rumbai Barat. Ketimpangan ini dapat mengindikasikan adanya masalah dalam distribusi sumber daya, aksesibilitas, dan kualitas layanan PAUD di berbagai wilayah Kota Pekanbaru. Disisi lain Program Sekolah Ramah Anak (SRA) merupakan indikator penting dalam menilai kualitas lingkungan belajar yang aman dan kondusif bagi anak. Namun, data menunjukkan bahwa capaian SRA di Kota Pekanbaru masih belum optimal.

**Tabel 5. Status Sekolah Ramah Anak**

| <b>Jenis Lembaga</b> | <b>Total Lembaga</b> | <b>Sudah SRA</b> | <b>Belum SRA</b> | <b>% SRA</b> |
|----------------------|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| <b>TK</b>            | 325                  | 215              | 110              | 66,2%        |
| <b>KB</b>            | 203                  | 67               | 136              | 33,0%        |
| <b>TPA</b>           | 55                   | 1                | 54               | 1,8%         |
| <b>SPS</b>           | 26                   | 6                | 20               | 23,1%        |
| <b>Total</b>         | <b>609</b>           | <b>289</b>       | <b>320</b>       | <b>47,5%</b> |

*Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru tahun 2025*

Hanya 47,5% lembaga PAUD yang telah mencapai status Sekolah Ramah Anak. Kondisi terburuk terjadi pada TPA dimana hanya 1,8% yang telah memenuhi standar SRA. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas lembaga PAUD masih belum mampu menyediakan lingkungan yang sepenuhnya aman dan ramah bagi anak-anak. Kenyataan di lapangan menunjukkan banyak lembaga PAUD yang belum memenuhi standar tersebut. Kondisi sarana prasarana yang tidak memadai mencakup keterbatasan ruang kelas yang nyaman, minimnya alat permainan edukatif (APE) yang sesuai standar, fasilitas sanitasi yang tidak memadai, serta ruang bermain outdoor yang terbatas (Kompasiana, 2024). Permasalahan ini diperparah dengan sistem pengelolaan dan pemeliharaan sarana prasarana yang belum optimal, dimana tingkat kelembaban ruang yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan pada alat permainan edukatif, dan banyak lembaga PAUD yang tidak memiliki sistem perawatan yang memadai untuk menjaga kualitas fasilitas pembelajaran (Kompasiana, 2021). Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pembelajaran anak karena sarana dan prasarana yang tidak memadai mengganggu proses belajar siswa dan membuat pembelajaran menjadi tidak nyaman (Kompasiana, 2024).

Fenomena-fenomena tersebut saling berkaitan dan menciptakan dampak negatif yang signifikan terhadap keberlangsungan proses belajar anak-anak didik PAUD. Dari aspek kognitif, anak-anak yang mendapat layanan PAUD berkualitas rendah cenderung mengalami keterlambatan dalam penguasaan konsep dasar seperti

huruf, angka, warna, dan bentuk yang menjadi landasan pembelajaran selanjutnya (MTs Negeri 8 Sleman, 2024). Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah juga tidak berkembang optimal karena stimulasi yang diberikan oleh guru yang tidak berkualifikasi tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak, sementara keterbatasan alat permainan edukatif menghambat eksplorasi dan pembelajaran melalui bermain (Campuspedia, 2023).

Dampak jangka panjang dari ketiga fenomena tersebut terhadap kehidupan anak-anak sangat signifikan dan bersifat irreversible. Anak yang tidak mendapat stimulasi yang tepat di usia dini akan mengalami kesulitan dalam pencapaian akademik di jenjang pendidikan selanjutnya, dimana penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang tidak mengikuti PAUD berkualitas memiliki tingkat kesiapan sekolah yang rendah, prestasi akademik yang lebih rendah, dan risiko putus sekolah yang lebih tinggi (MTs Negeri 8 Sleman, 2024). Dari aspek perkembangan sosial, anak-anak tersebut cenderung mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan interpersonal yang sehat, memiliki kemampuan empati yang rendah, dan kesulitan dalam mengelola konflik secara konstruktif (BGP Sulawesi Utara, 2023).

### **Kondisi Mutu PAUD di Kota Pekanbaru**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola lembaga PAUD dan observasi lapangan, kualitas layanan PAUD di Kota Pekanbaru masih menghadapi sejumlah persoalan fundamental. Pertama, masih terdapat kesenjangan kompetensi pendidik. Sebagian besar guru PAUD berpendidikan minimal Diploma II atau S1 non-psikologi dan non-PAUD, sehingga pemahaman mereka tentang perkembangan anak masih terbatas. Data dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa lebih dari 35% guru PAUD belum memiliki sertifikasi pendidik khusus PAUD. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya perencanaan pembelajaran berbasis kurikulum 2013 PAUD (K-13 PAUD). Kedua, aspek sarana dan prasarana juga masih belum merata. Sebagian besar PAUD swasta kecil yang dikelola masyarakat belum memiliki ruang kelas sesuai standar, area bermain outdoor yang aman, dan alat permainan edukatif yang sesuai perkembangan anak. Kondisi ini berimplikasi pada keterbatasan stimulasi anak dalam aspek motorik, sosial, maupun kognitif. Ketiga, tingkat keterlibatan orang tua masih rendah. Banyak orang tua menganggap PAUD hanya sebagai tempat penitipan anak sebelum masuk SD. Padahal, sesuai Standar Nasional PAUD (Permendikbud No. 137 Tahun 2014), keterlibatan orang tua merupakan komponen penting dalam keberhasilan pendidikan anak usia dini. Keempat, dukungan pemerintah daerah dalam bentuk anggaran, pelatihan, maupun monitoring masih terbatas. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD) yang diberikan pemerintah pusat memang membantu, namun jumlahnya belum cukup untuk mengatasi berbagai keterbatasan.

Selain itu, monitoring mutu PAUD dari Dinas Pendidikan masih bersifat administratif, bukan pada aspek substantif kualitas pembelajaran.

Mutu PAUD sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidiknya. Teori *human capital* menyatakan bahwa investasi pada pendidikan guru akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan (Becker, 1993). Dalam konteks Pekanbaru, kompetensi guru masih menjadi persoalan mendasar. Guru PAUD yang belum memiliki latar belakang pendidikan formal PAUD kesulitan menerapkan prinsip-prinsip *developmentally appropriate practice* (DAP). Model implementasi peningkatan mutu yang efektif harus menempatkan pelatihan berkelanjutan (*continuous professional development*) sebagai prioritas. Pelatihan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mencakup pemahaman filosofi pendidikan anak usia dini. Dengan demikian, guru mampu menjadi fasilitator yang mendorong anak belajar secara aktif, kreatif, dan menyenangkan. Selain itu, strategi *peer learning* antar-guru juga penting. Forum komunikasi guru PAUD yang difasilitasi pemerintah daerah dapat menjadi ruang berbagi praktik baik, diskusi kurikulum, hingga inovasi pembelajaran. Hal ini sejalan dengan penelitian Darling-Hammond (2017) yang menunjukkan bahwa *professional learning communities* efektif meningkatkan kualitas pengajaran.

Dukungan kebijakan memiliki peran strategis dalam keberlanjutan mutu PAUD. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu memastikan bahwa anggaran pendidikan, termasuk dana BOP-PAUD, dialokasikan secara tepat sasaran. Selain bantuan operasional, perlu adanya program beasiswa atau subsidi pelatihan bagi guru yang ingin melanjutkan studi ke jenjang S1 atau S2 PAUD. Dari perspektif *policy implementation theory* (Mazmanian & Sabatier, 1983), kebijakan akan efektif jika jelas tujuan, adanya sumber daya memadai, serta dukungan dari aktor pelaksana. Dalam konteks PAUD Pekanbaru, implementasi kebijakan peningkatan mutu masih belum konsisten. Monitoring yang dilakukan lebih menekankan administrasi, padahal seharusnya menilai kualitas interaksi belajar, kesejahteraan anak, dan keterlibatan orang tua. Dengan demikian, model implementasi harus mencakup *policy reorientation*, yakni perubahan fokus dari administrasi ke kualitas substantif. Pemerintah daerah perlu menetapkan indikator mutu yang holistik, misalnya tingkat kepuasan orang tua, perkembangan anak, serta profesionalisme guru.

Partisipasi orang tua adalah kunci keberhasilan PAUD. Bronfenbrenner (1979) dalam Ecological Systems Theory menegaskan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi antara rumah, sekolah, dan masyarakat. Sayangnya, di Pekanbaru masih banyak orang tua yang memandang PAUD sekadar tempat menitipkan anak. Untuk mengatasi hal ini, perlu ada program parenting education yang sistematis. Misalnya, workshop bulanan mengenai stimulasi perkembangan

anak, komunikasi positif, atau pengasuhan berbasis nilai-nilai lokal. Selain itu, sekolah dapat mengadakan parent involvement program seperti kelas bersama orang tua, kegiatan gotong royong, atau pertemuan rutin untuk membahas perkembangan anak. Partisipasi masyarakat luas juga dapat digerakkan melalui kolaborasi dengan organisasi keagamaan, LSM pendidikan, maupun sektor swasta. Contohnya, perusahaan dapat mendukung PAUD melalui program CSR berupa penyediaan alat permainan edukatif atau pelatihan guru.

### **Praktik Baik (Best Practices) di Lembaga PAUD**

Meskipun masih banyak persoalan, terdapat sejumlah praktik baik yang dapat menjadi inspirasi model implementasi peningkatan mutu. Beberapa PAUD unggulan di Pekanbaru sudah berhasil mengintegrasikan pembelajaran tematik berbasis bermain, melibatkan orang tua dalam kegiatan parenting education, serta memanfaatkan teknologi digital sederhana (misalnya penggunaan aplikasi WhatsApp untuk komunikasi perkembangan anak). Di samping itu, beberapa guru PAUD dengan inisiatif pribadi mengikuti pelatihan daring nasional seperti *Guru Penggerak PAUD* atau workshop yang diselenggarakan asosiasi profesi. Praktik ini menunjukkan adanya potensi peningkatan mutu dari bawah (*bottom-up*) apabila didukung dengan kebijakan yang tepat.

### **Temuan Utama Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis data, terdapat tiga faktor utama yang menentukan mutu PAUD di Kota Pekanbaru:

1. Kompetensi Pendidik mencakup pedagogi, pengetahuan perkembangan anak, serta keterampilan dalam merancang kegiatan belajar yang menyenangkan.
2. Dukungan Kebijakan dan Pendanaan – mencakup alokasi anggaran, regulasi standar mutu, serta monitoring yang berfokus pada kualitas.
3. Kolaborasi dengan Orang Tua dan Masyarakat – meliputi keterlibatan dalam perencanaan program, pengawasan, serta partisipasi aktif dalam kegiatan belajar anak.

Temuan penelitian ini memperkuat teori bahwa kualitas pendidikan anak usia dini dipengaruhi oleh faktor multi-level. Menurut OECD (2018), sistem PAUD yang efektif adalah yang mengintegrasikan dimensi kualitas struktural (rasio guru-anak, kualifikasi guru, fasilitas) dan kualitas proses (interaksi guru-anak, kurikulum berbasis bermain, keterlibatan orang tua). Dalam konteks Pekanbaru, masih terjadi kesenjangan pada kedua dimensi tersebut. Namun, dengan penerapan model

implementasi yang diusulkan, gap tersebut dapat diperkecil. Selain itu, model ini sejalan dengan prinsip *Whole Child Approach*, yaitu melihat anak sebagai individu yang berkembang secara utuh dalam aspek kognitif, sosial, emosional, dan moral.

## KESIMPULAN

Penelitian mengenai *Model Implementasi Peningkatan Mutu PAUD di Kota Pekanbaru* menemukan bahwa kualitas layanan pendidikan anak usia dini masih menghadapi tantangan yang cukup kompleks. Kesenjangan kompetensi guru, keterbatasan sarana prasarana, rendahnya keterlibatan orang tua, serta dukungan kebijakan yang belum optimal merupakan faktor penghambat utama dalam peningkatan mutu. Namun, di sisi lain, terdapat praktik baik berupa inisiatif guru, PAUD unggulan, dan keterlibatan komunitas yang menunjukkan potensi perbaikan berkelanjutan. Model implementasi yang dihasilkan dalam penelitian ini menekankan tiga dimensi utama, yaitu:

1. Penguatan kompetensi pendidik melalui pelatihan berkelanjutan, forum guru, dan insentif pendidikan.
2. Optimalisasi dukungan kebijakan dan pendanaan dari pemerintah daerah, dengan fokus pada kualitas substantif dan transparansi alokasi anggaran.
3. Kolaborasi partisipatif antara sekolah, orang tua, dan masyarakat, melalui program parenting education, keterlibatan komunitas, serta kemitraan dengan sektor swasta.

Kesimpulannya, peningkatan mutu PAUD di Kota Pekanbaru hanya dapat tercapai apabila terdapat sinergi yang kuat antara pendidik, pemerintah, dan masyarakat. Implementasi model ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas pembelajaran anak, tetapi juga memperkuat fondasi pendidikan dasar secara keseluruhan. Dengan demikian, PAUD di Pekanbaru berpotensi menjadi contoh pengembangan layanan pendidikan anak usia dini yang berkelanjutan, berdaya saing, serta relevan dengan kebutuhan lokal maupun standar nasional pendidikan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa mutu PAUD di Pekanbaru masih menghadapi berbagai tantangan, namun terdapat peluang besar untuk ditingkatkan melalui model implementasi yang berfokus pada tiga dimensi utama: penguatan pendidik, optimalisasi kebijakan, dan kolaborasi orang tua-masyarakat. Pembahasan menegaskan bahwa mutu PAUD tidak dapat ditingkatkan hanya dengan pendekatan administratif, melainkan harus melalui upaya sistematis, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan implementasi model ini, PAUD di Kota Pekanbaru berpotensi menjadi layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu, setara dengan standar nasional, dan relevan dengan kebutuhan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, A., & Rodiyah, R. (2023). Implementasi kebijakan publik: Tantangan dan peluang dalam pembangunan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2), 145–158.

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2024). *Laporan pelaksanaan PAUD Holistik Integratif*. Jakarta: Bappenas.
- Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). Chicago: University of Chicago Press.
- BGP Sulawesi Utara. (2023). *Peran PAUD dalam membangun keterampilan sosial anak*. Manado: Balai Guru Penggerak Sulut.
- Bronfenbrenner, U. (1979). *The ecology of human development: Experiments by nature and design*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Campuspedia. (2023). Pentingnya PAUD dalam membentuk kemampuan kognitif anak. Diakses dari <https://campuspedia.id>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Darling-Hammond, L. (2017). Teacher education around the world: What we have learned from international studies. *European Journal of Teacher Education*, 40(3), 291–309. <https://doi.org/10.1080/02619768.2017.1315399>
- Díaz-García, I., González-Sala, F., & Guardiola, J. (2022). Bibliometric analysis and visualization of scientific production. *Scientometrics*, 127(1), 233–249. <https://doi.org/10.1007/s11192-021-04135-9>
- Direktorat PPG Kemendikdasmen. (2024). *Data guru PAUD Indonesia 2024*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Educcation. (2022). *Critical periods in child development*. Diakses dari <https://educcation.org>
- Education Week. (2022). Preschool improves attendance and engagement. Diakses dari <https://www.edweek.org>
- First Focus Campaign for Children. (2023). *Early childhood brain development*. Washington, DC: First Focus.
- First Things First. (2024). *Brain development in early childhood*. Phoenix, AZ: First Things First.
- Ghertescu, M., Ionescu, D., & Popa, S. (2024). Advances in bibliometric analysis using VOSviewer. *Journal of Informetrics*, 18(2), 78–95. <https://doi.org/10.1016/j.joi.2024.100123>
- Husaeni, U. A., & Nandiyanto, A. B. D. (2021). The use of VOSviewer for bibliometric analysis. *Indonesian Journal of Science and Technology*, 6(1), 214–229.
- Kadji, Y. (2015). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, evaluasi*. Gorontalo: UNG Press.
- Kompasiana. (2021). Tantangan sarana prasarana PAUD di Indonesia. Diakses dari <https://www.kompasiana.com>
- Kompasiana. (2024). Kualitas PAUD dan dampaknya pada perkembangan anak. Diakses dari <https://www.kompasiana.com>
- Márquez, M., Ortega, J., & Peña, A. (2023). Visualization tools in bibliometrics: Applications of VOSviewer. *Information Research*, 28(4), 445–460.

- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and public policy*. Glenview, IL: Scott, Foresman.
- MTs Negeri 8 Sleman. (2024). *Golden age anak usia dini*. Sleman: MTsN 8 Sleman Press.
- Nelson, C. A. (2013). Brain development and childhood adversity. *Science*, 342(6158), 1189–1190. <https://doi.org/10.1126/science.1243797>
- Nugroho, R. (2014). *Public policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2018). *Starting strong V: Transitions from early childhood education and care to primary education*. Paris: OECD Publishing.
- Qin, L., Sun, Y., & Zhao, X. (2023). Mapping intellectual structure with VOSviewer. *Journal of Documentation*, 79(6), 1204–1221.
- Schweinhart, L. J., Montie, J., Xiang, Z., Barnett, W. S., Belfield, C. R., & Nores, M. (2016). *Lifetime effects: The HighScope Perry Preschool study through age 40*. Ypsilanti, MI: HighScope Press.
- Subiyanto, S. (2020). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, N., Wijayanti, D., & Prasetyo, B. (2021). Pengaruh implementasi kebijakan tunjangan kinerja terhadap motivasi pegawai. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 44–55.
- Thabrani, R., Yusuf, A., & Putri, M. (2022). Dinamika implementasi kebijakan publik di daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 19(2), 133–148.
- UNESCO. (2021). *Early childhood care and education*. Paris: UNESCO Publishing.
- UNICEF. (2023). *Early childhood development: The critical window*. New York: UNICEF.
- Utari, L., Rahmawati, N., & Sari, D. (2024). Evaluasi implementasi kebijakan pendidikan anak usia dini. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(1), 22–35.
- Widodo, J. (2010). *Analisis kebijakan publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Xue, Y., Li, H., & Zhang, J. (2021). Cross-disciplinary bibliometric analysis with VOSviewer. *Journal of Informetrics*, 15(2), 101–114.
- Yin, R. K. (2014). *Case study research: Design and methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.